

MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR

Ikeu Mustika¹, Mulyawan Safwandy Nugraha²

¹²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Indonesia

Corresponding Email: ikeumustika63@gmail.com

Abstract:

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya manajemen pembiayaan pendidikan dalam menunjang kelangsungan kegiatan pendidikan di Sekolah Dasar. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan sumber dana sekolah, tanggung jawab keuangan, transparansi dalam pengelolaan keuangan, serta dampaknya terhadap mutu pembelajaran di kelas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus tunggal, fokus pada manajemen pembiayaan pendidikan di Sekolah Dasar Tarumajaya, Bandung. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara finansial, Sekolah Dasar Tarumajaya tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh dana pendidikan dan penggunaannya diarahkan untuk kepentingan pendidikan. Kepala sekolah bekerja sama dengan bendahara dalam mengelola dana, yang berkontribusi pada pelaksanaan program sekolah yang baik. Sistem akuntabilitas di sekolah ini menunjukkan adanya tanggung jawab yang jelas, dengan transparansi yang diwujudkan melalui penempatan laporan penggunaan dana di papan pengumuman untuk akses publik. Penggunaan dana secara efektif juga terbukti meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas, terlihat dari penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan.

Kesimpulannya, manajemen pembiayaan pendidikan di Sekolah Dasar Tarumajaya telah mengikuti prosedur yang baik, menunjukkan akuntabilitas dan transparansi yang kuat, serta mendukung peningkatan mutu pembelajaran.

Keyword: Pendidikan, pendanaan, pengelolaan pembiayaan

PENDAHULUAN

Memajukan dan mengembangkan pendidikan dalam konteks kehidupan saat ini adalah suatu kewajiban dan keharusan. Disebut sebagai suatu kewajiban, karena kehadiran pendidikan yang merupakan suatu produk budaya masyarakat dan bangsa, yang terus berkembang untuk mencari karakternya yang paling cocok, sesuai dengan perubahan dinamis yang terjadi didalam masyarakat setiap bangsa. Dan dikatakan sebagai suatu keharusan, karena begitu pentingnya peran pendidikan dalam upaya pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan merupakan ujung tombak suatu bangsa, sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan pendidikan ialah untuk memberikan kecerdasan bagi kehidupan bangsa, memberikan perlindungan bagi setiap orang dari tumpah darah Indonesia, memberikan kemajuan kesejahteraan umum, dan ikut mewujudkan kemakmuran rakyat, tatanan dunia. Pendidikan itu sangat penting, terlebih ditengah kehidupan modern ini. Kemajuan bangsa ditentukan oleh tenaga kerja yang cerdas, kompeten dan berdaya saing dalam dunia pekerjaan. Pendidikan harus menjadi prioritas.

Oleh karena itu, kualitas pendidikan harus tinggi baik dilingkungan perkotaan maupun pedesaan. Pendidikan yang layak berhak didapatkan oleh semua orang. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam berbagai tingkat kehidupan. Pendidikan menawarkan banyak kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidup seseorang. Dengan pendidikan yang baik, manusia dapat lebih mengembangkan potensi dirinya yang sangat kaya. Ditingkat sosial, pendidikan dapat mendorong orang menuju tujuan yang ingin dicapai serta kemapanan tingkat sosial. Umumnya, pendidikan dapat mengubah masyarakat menjadi lebih beradab. Oleh karena itu, peran pendidikan sangat penting dalam proses perubahan manusia dan sosial. Apa yang terjadi secara alami dalam arti memberikan bakat yang diharapkan tidak dapat dilakukan tanpa usaha dan pengorbanan.

Pendidikan yang berkualitas dan bermutu sangat diharapkan oleh semua pihak, tentu ada proses dan jenjang yang harusalui, sebagaimana yang dikatakan oleh Budaya (2017) bahwa jenjang pendidikan dasar merupakan satuan pendidikan yang keberadaannya sangat urgen, pada jenjang ini ditanamkan dasar-dasar untuk jenjang selanjutnya. Apa yang diperoleh peserta pada jenjang pendidikan dasar akan menjadi bekal berharga bagi mereka dalam menjalankan proses pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Oleh karenanya, banyak hal yang harus diperhatikan, salah satunya ialah masalah pembiayaan pendidikan. Salah satu hal yang cukup penting dalam penyelenggaraan pendidikan adalah masalah pembiayaan. Seperti yang dilaporkan oleh Kusuma dewi (2015) bahwa pembiayaan pendidikan ikut memberikan pengaruh terhadap kualitas Pendidikan pada segala jenjangnya. Seperti penetapan anggaran untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada setiap tahunnya. Walaupun sebenarnya pemerintah Republik Indonesia setiap tahun telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar minimal 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan memainkan peran sentral bagi peningkatan kualitas pendidikan baik pada sekolah negeri maupun swasta. Semua kegiatan pendidikan membutuhkan biaya dan dana. Peranan pendidikan baik sebagai mata pelajaran maupun tujuan pendidikan menurut Anwar(2016) akan selalu berkaitan dengan rangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mendapatkan suatu tujuan yang diinginkan. Dalam perjalanan suatu aktivitas tersebut timbul suatu masalah yang berkaitan dengan biaya pendidikan. Sementara itu ada kebutuhan mendesak akan pendanaan pengelolaan sekolah berdasarkan kebutuhan operasional dan riil yang terdiri dari honor/gaji, tunjangan karyawan, peningkatan proses belajar mengajar, pengadaan sarana dan prasarana, pemeliharaan, peningkatan pembinaan siswa, dan meningkatkan kompetensi profesional guru, pengelolaan dan pengawasan sekolah. Biaya pendidikan bukanlah hal baru, tetapi harus diperhitungkan dalam perhitungan, terutama pada ajaran baru dimulai. Isu mengenai pengelolaan pembiayaan pendidikan telah banyak dibicarakan dan dikaji oleh para peneliti. Sebagai manayang dilaporkan oleh Fauzi (2020) bahwa biaya pendidikan merupakan faktor yang penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Begitu pula Hafni & Rahmawati (2022) yang melaporkan mengenai pengelolaan dana pendidikan sekolah dasar pada pandemi Covid-19 yang mengalami penurunan dan penyesuaian dengan situasi dan kondisi. Sejalan dengan hal itu, Khuluqiah, et al. (2022) menginformasikan bahwa pengelolaan biaya pendidikan di TK AL-Adaby Pontianak telah berjalan dengan baik. Akan tetapi dalam hal ini penulis lebih fokus pada pengelolaan pembiayaan pendidikan pada

sekolah dasar, tujuannya ialah untuk menyajikan bagaimana implementasi pengelolaan pembiayaan pendidikan pada sekolah dasar yang diteliti. Pendanaan selalu dikaitkan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, dan manfaat dana pendidikan dirasakan sampai kepada peningkatan kualitas pembelajaran di kelas. Seperti hasil penelitian Fatonah (2021) yang menyebutkan bahwa terdapat pengaruh pemanfaatan dana operasional sekolah terhadap mutu proses pembelajaran di Sekolah. Sangat mudah diterima akal bahwa pendidikan yang berkualitas membutuhkan bantuan keuangan yang lumayan besar. Salah satu permasalahan pendidikan di Indonesia adalah sistem anggaran pendidikan, baik dari mekanisme penyaluran ataupun segi metode perhitungan. Mutu pendidikan adalah kemampuan sekolah dalam mengelola komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah secara fungsional dan efektif untuk menghasilkan nilai tambah sesuai dengan standar yang berlaku pada komponen-komponen tersebut. Seperti yang jelaskan oleh Fadhli (2017) bahwa untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan dibutuhkan usaha yang serius dan nyata dari semua pihak. Terdapat beberapa jenis biaya pendidikan menurut Ferdi (2013) yaitu: 1) biaya langsung (*direct cost*); 2) biayatidak langsung (*indirect cost*); 3) biaya pribadi (*privatecost*); 4) biaya masyarakat (*social cost*); 5) *monetary cost*; dan 6) *non monetary cost*. Sebagian besar masyarakat Indonesia sering mengeluhkan jenis biaya pribadi yakni biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua siswa. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa biaya pendidikan merupakan komponen penting yang tak dapat terpisahkan dari keberlangsungan proses pendidikan di sekolah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia merupakan landasan hukum dan penopang sikap pemerintah dalam mereforma sisistem pendidikan nasional Indonesia, yang sebelumnya membentuk Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). MBS adalah program reformasi pendidikan Indonesia yang mencakup visi, misi, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional untuk mewujudkan pendidikan bermutu yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan berdaya saing dalam kehidupan masyarakat global. Menguatkan semangat pembaharuan pendidikan terutama melalui Undang-Undang Republik Indonesia (UU) No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Keputusan Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Nasional (SNP) dan serangkaian pedoman teknis yang mengatur pelaksanaan undang-undang dan peraturan pemerintah ini baik ditingkat departemen pemerintah daerah maupun sekolah sebagai pemegang otonomi pendidikan ditingkat paling bawah. Pernyataan tersebut juga menunjukkan betapa pentingnya mengembangkan sekolah dasar tradisional menjadi bentuk yang lebih profesional dan futuristik. Pendirian sekolah dasar merupakan keharusan serta keinginan dalam usaha menciptakan sekolah dasar yang bermutu untuk semua kelas sosial. Mengingat perannya yang cukup besar, maka sekolah dasar harus dipersiapkan sebaik-baiknya, baik dari sisi sosial dan kelembagaan ataupun secara teknis dan akademik. PP No.48 Tahun 2008 tentang pembiayaan pendidikan pasa 12 (ayat1) menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan ditanggung bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat. Namun masyarakat berarti di sini: a) penyelenggara atau unit pelatihan yang dibentuk oleh masyarakat; b) Siswa, orang tua atau wali sah siswa; dan c) lembaga selain yang tersebut pada huruf a dan b yang mempunyai urusan dan tugas dibidang pendidikan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikemukakan bahwa

masalah keuangan dalam dunia pendidikan merupakan masalah yang cukup serius, masalah yang tidak dapat dianggap remeh keberadaannya, dan memberikan andil penting bagi keberlangsungan suatu lembaga pendidikan. Dapat dikatakan juga bahwa proses pendidikan, dalam berbagai jenjangnya, tidak dapat berjalan dengan baik tanpa dukungan finansial yang memadai, termasuk juga aspek kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak, baik itu dukungan dari pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat luas. Begitu pentingnya posisi pembiayaan dalam pendidikan, maka tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas pendidikan itu sendiri ikut ditentukan oleh baiknya pengelolaan dana dalam pendidikan. Banyak sekolah yang tidak mampu melaksanakan proses pembelajaran secara maksimal dikarenakan masalah biaya, baik dalam membayar guru maupun dalam menyediakan kesempatan belajar dan sarana prasarana sekolah. Dalam hal ini, seiring dengan tuntutan reformasi terdapat pendidikan yang terjangkau dan berkualitas. Namun, pendidikan yang berkualitas selalu membutuhkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Pembiayaan dalam pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Tarumajaya yang pada konteks penelitian ini membahas asal dana pendidikan yang didapat serta akuntabilitas sekolah dalam pengelolaannya.

METODE

Penulis menggunakan *case study* tunggal dalam penelitian ini yang terfokus pada manajemen pembiayaan pendidikan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Creswell (2014) bahwa pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dan memperdalam makna individu atau sekelompok orang, yang dianggap berasal dari masalah sosial ataupun kemanusiaan. Kualitatif juga dimaknai sebagai suatu jenis penelitian yang temuannya tidaklah berbentuk hitungan.

Agar informasi yang diperoleh mencukupi, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelusuran dokumen. Teknik studi dokumennya itu mengumpulkan informasi dari berbagai dokumen dan buku yang berkaitan dengan fokus penelitian ini adalah sumber pendanaan dan tanggungjawab keuangan sekolah di SD Tarumajaya. Selain itu penulis juga menggunakan teknik wawancara. Adapun teknik wawancara dapat dilakukan secara mandiri dalam penelitian kualitatif atau juga dapat digunakan bersamaan dengan teknik pengumpulan data lainnya seperti observasi. Untuk mengumpulkan data yang lebih komprehensif, dilakukan kegiatan investigasi berupa kegiatan tanya jawab bagi entitas yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan keuangan. Dalam hal ini bendahara umum dan operator serta pengeloladana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Tarumajaya. Wawancara memberikan informasi tambahan tentang penerimaan dan pengelolaan dana yang diterima oleh sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian di Sekolah Dasar (SD) Tarumajaya dapat dipaparkan penjelasan sebagai berikut: Kondisi Objek Penelitian SD Tarumajaya adalah salah satu sekolah dasar swasta yang beralamat di Jln. Pajaten RT 03 RW 02 Desa Tarumajaya Kecamatan Kertasari Kab. Bandung. Islam merupakan basis dari sekolah ini karena ia berada pada Yayasan Miftahul Falah. SD Tarumajaya didirikan pada tahun 1990. Kegiatan belajar mengajar di

sekolah ini di laksanakan sebanyak enam hari dalam seminggu. Memakai kurikulum yang dikolaborasi antara kurikulum nasional dan Kementerian Agama. Saat ini SD Tarumajaya mempunyai gedung sekolah dengan rincian enambelas lokal atau kelas, 1 ruang kepala sekolah, 2 ruang guru, 1 ruang tata usaha sekolah, 1 ruang multimedia, musholla, satu ruang UKS, 1 ruang perpustakaan, 1 ruangan laboratorium komputer dan ruang admin yayasan. Sarana dan prasarana SD Tarumajaya cukup baik dan cukup lengkap untuk digunakan siswa. Mulai dari sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar hingga kegiatan ekstrakurikuler. Tenaga pendidik dan kependidikan yang berada di SD Tarumajaya jumlahnya sudah cukup memadai dengan jumlah kelas dan siswa yang ada di Sekolah tersebut. Dimana terdiri dari 6 Tenaga pengajar tetap (yayasan), 19 Tenaga pengajar tidak tetap, 1 Tenaga tata usaha, dan 1 Tenaga kebersihan sekolah. Sumber Dana Pendidikan Berdasarkan hasil observasi serta wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa dari berbagai sumber pendanaan yang didapatkan, pendanaan yang cukup besar adalah dana dari iuran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) siswa/siswi. Hal itu sesuai hasil wawancara dengan kepala sekolah sebagai berikut: “Sumber pendanaan yang terbesar di sekolah ini ialah dari SPP para siswa yang dibayar sebulan sekali berjumlah Rp.115.000 per-siswa, dengan perincian yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Sedangkan dana BOS yang diberikan kepada sekolah dan diterima oleh pihak sekolah dalam periode tertentu, besarnya jumlah dana BOS yang diterima sekolah setiap tahun berbeda-beda. Sedangkan sebelum tahun 2020 dana BOS yang diterima oleh SD Tarumajaya sebanyak empat kali dalam setahun yaitu setiap akhir triwulan”. Penggunaan dana BOS di SD Tarumajaya disini berdasarkan keputusan serta kesepakatan bersama dari komite sekolah dengan semua tenaga pengajar termasuk bendahara dan pengelola dana bantuan operasional sekolah. Pelibatan komite dalam penyusunan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah sejalan pula dengan hasil penelitian Zein (2016) yang melaporkan bahwa di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri1 Pelaihari juga melibatkan pihak komite sekolah sebagai perwakilan dari para orang tua, serta melibatkan para guru dalam penyusunan strategi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan sistem pelaporan anggaran sekolah. Hal senada juga dilaporkan oleh Usman (2016) bahwa sumber biaya pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 19 Percontohan Banda Aceh bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK), Keluarga, dan Masyarakat. Sudarmono et al. (2021) mempertegas bahwa sumber dana pendidikan berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua siswa. Ketika telah diketahui sumber pendanaan yang tersedia, langkah selanjutnya adalah merancang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Untuk sumber dana dari lain-lainnya, berupa sumbangan kantin atau koperasi sekolah bersifat opsional atau tidak menetap dalam bentuk sumber pendanaan lain. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar orangtua atau wali siswa SD Tarumajaya mengetahui bahwa pendidikan yang bermutu merupakan tanggungjawab bersama, bukan hanya tanggungjawab pemerintah atau negara. Namun, perhatian juga diberikan pada pengelolaan dana yang didapatkan. Anggaran serta penggunaan dana harus disesuaikan dalam peraturan yang direncanakan dan diterbitkan. Pada tahun 2019, SD Tarumajaya menerima pencairan sebanyak empat kali dari dana BOS sebagian besar dari dana tersebut digunakan untuk mengadakan jumlah buku pelajaran bagi siswa pada tahun ajaran. Berbeda dengan dana BOS tahun lalu, dana BOS tahun 2020 hanya dua kali dalam setahun. Pada tahun 2021 SD Tarumajaya akan menerima dari dana pada akhir triwulan pertama. Kemudian, dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020, tugas dana BOS yaitu untuk mendukung kegiatan operasional sekolah seperti biaya pembangunan perpustakaan sekolah, biaya penerimaan peserta didik baru, pembayaran listrik dan jasa kelistrikan, biaya

guru suka relawan. Namun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan peraturan baru di tahun 2020 terkait penggunaan dana bantuan operasional sekolah untuk kebutuhan pandemi Covid-19. Selain itu, pada tahun 2020 dengan dana dari SPP siswa diperoleh sejumlah Rp.200.000.000 sedangkan pada tahun 2021 diperoleh lebih kurang Rp.201.000.000. Dalam menggunakan pendanaan yang ada, baik dana dari pemerintah maupun non pemerintah, harus diperhatikan aturan dan ketentuan yang berlaku. Meningkatkan mutu pendidikan tidak hanya untuk menyangkut masalah teknis, Namun juga terkait bermacam masalah yang sangat kompleks dan rumit. Peningkatan mutu pengajaran juga memerlukan pengelolaan pendidikan yang lebih baik, baik dari segi perencanaan, pembiayaan maupun efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan sistem persekolahan. Faktor yang dapat mempengaruhi mutu dalam pengajaran adalah manajemen sekolah. Penyelenggaraan pendidikan yang bermutu memerlukan pengelolaan sumber daya yang ada disekolah secara menyeluruh dan profesional. Satu-satunya sumber daya yang harus dikelola dengan baik adalah masalah pendanaan ataupun pembiayaan. Karakteristik keuangan sekolah merupakan dasar empiris dari biaya pendidikan. Pasal 20 Ayat 11 Ayat 2 Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban menjamin tersedianya dana bagi setiap warga negara yang berusia antara 7 sampai dengan 15 tahun. Terdapat 3 sumber yang diklasifikasikan secara garis besar menurut (Mulyasa, 2017) Pertama pemerintah baik pusat maupun daerah dan keduanya bersifat umum atau khusus dan ditujukan untuk tujuan pendidikan. Pemerintah berupaya meningkatkan alokasi untuk pendidikan, menggunakan pendana dengan efektif dan efisien, dan mencari alokasi untuk pendidikan yang berasal dari pajak umum. Kedua, orang tua atau siswa. Beri tahu orangtua bahwa mereka bersedia dan mampu membayar uang sekolah dan dana lain yang disetujui pemerintah. Maka dana dari orang tua siswa harus digunakan seefisien danseefektif mungkin, dan Ketiga, Komunitas, baik pilihan maupun wajib. Ajak komunitas untuk membimbing siswa. Tentunya biaya atau dana dibutuhkan oleh sekolah untuk menjalankan kegiatan sekolah atau untuk menjalankan proses kegiatan belajar mengajar. Pentingnya pendanaan saat ini tidak dapat disangkal. Untuk menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar di SD Tarumajaya menggunakan dana dari berbagai sumber. Ini termasuk dari pemerintah dalam bentuk dana BOS (Bantuan Operasi Sekolah), dalam bentuk iuran bulanan peserta didik dan dari sumber pendanaan lain termasuk iuran/sumbangan dari wali murid dan dana kantin/koperasi sekolah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Yuliani (2016) yang membuktikan bahwa pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo juga berasal dari BOS Pusat/regular, BOS Provinsi/BOSDA, dan BOS Kabupaten yang pengalokasiannya digunakan untuk memenuhi standar nasional pendidikan. Petunjuk dan teknis mengenai BOS (Bantuan Operasional Sekolah) tercantum di dalam Permendiknas No. 37 Tahun 2010, dijelaskan bahwa program negara yang tujuan pada hakekatnya untuk membiayai pengeluaran operasional diluar kepegawaian satuan sekolah dasar untuk penerapan program wajib belajar. Namun pandangan umum, tujuan program BOS adalah untuk membebaskan sektor publik dari pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.

Pelaksanaan Sekolah dalam Pengelolaan Dana Pendidikan Berdasar kaninformasi yang diterima peneliti tentang perencanaan pengelolaan keuangan SD Tarumajaya, langkah utama yang dilakukan yaitu mengadakan pertemuan dengan seluruh tenaga pendidik dan kependidikan sekolah untuk membahas kebutuhan dan tujuan untuk periode tertentu. Hal itu sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala sekolah sebagai berikut: “Ya, langkah utama kami lakukan dalam rangka pengelolaan dana pendidikan di sekolah ini ialah mengadakan pertemuan dengan seluruh tenaga pendidik dan kependidikan sekolah untuk membahas kebutuhan dan tujuan untuk periode tertentu. Contohnya jangka waktu pendek, menengah

dan panjang. Selanjutnya, RAPBS disusun. Tentu didalamnya yaitu membahas terhadap gambaran pengeluaran maupun pendapatan atau biaya/belanja sekolah untuk periode tertentu, disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Seperti pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia guru, biaya/gaji guru tidak tetap yayasan (GTT), biaya perawatan sekolah dan kebutuhan lain yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas.” Sistem pembiayaan pendidikan adalah proses dimana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah, tergantung dari kondisi masing-masing negara seperti kondisi geografis, tingkat pendidikan, kondisi politik pendidikan, hukum pendidikan, ekonomi pendidikan, program pembiayaan pemerintah dan administrasi sekolah. Pembiayaan sekolah adalah proses dimana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk memformulasika dan mengoperasionalkan sekolah di berbagai wilayah geografis dan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Hal yang utama dalam proses *management* adalah *planning* (perencanaan). Perencanaan adalah merupakan proses yang sistematis dan rasional dimana tahap-tahap operasi dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian ini mencakup unsur-unsur bahwa perencanaan mempunyai proses, merupakan suatu perencanaan yang rasional dan sistematis, serta mempunyai tujuan yang harus dicapai. Perencanaan sebagai suatu proses, yaitu ini membutuhkan waktu, tidak bisa terjadi dalam semalam. Perencanaan pembiayaan sekolah didasarkan pada rencana pengembangan sekolah secara umum, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Perkembangan jangka pendek adalah perkembangan satu tahun. Perkembangan jangka Panjang adalah pembangunan lima tahun, sepuluh tahun atau bahkan 25 tahun. Rencana keuangan strategis disusun berdasarkan rencana pengembangan sekolah jangka pendek dan jangka panjang. Fitri (2014) menginformasikan bahwa pengaturan alokasi penggunaan dana sekolah di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukit Tinggi dituangkan dalam bentuk RAPBS, sehingga termuat rencana pertanggung jawaban kegiatan, perincian program, perincian kebutuhan barang dan sarana, serta total anggaran secara keseluruhan. Keunggulan pelaksanaan perencanaan keuangan sekolah terletak pada model dasar yang memberikan gambaran tentang tujuan, program dan layanan yang diinginkan atau penyelenggaraan kegiatan layanan sekolah. Perencanaan juga memiliki anggaran yang dirancang untuk memudahkan perencanaan. Mulyono (2019) mengemukakan bahwa anggaran juga menyediakan konteks untuk proses perencanaan, dimana langkah-langkah dipilih untuk mencapai tujuan yang disepakati. Penggunaan dana yang jujur serta rasional memerlukan suatu anggaran yang akan menjadi dokumen yang merangkum keputusan yang direncanakan. Anggaran juga menggambarkan fungsi lembaga. Manajemen sekolah mencoba merujuk pada konsep manajemen berbasis sekolah dalam mengelola sekolah. Pada bagian penjelasan Pasal 51 ayat 1 menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional, MBS diartikan yaitu merupakan “bentuk otonomi penyelenggaraan Pendidikan pada satuan pendidikan, dalam hal ini kepala sekolah atau madrasah dan kepala sekolah. Guru yang diangkat oleh komite sekolah atau madrasah untuk dibantu dalam memimpin kegiatan pendidikan”. Sementara itu, Tilaar mengklaim dari esensi yaitu MBS merupakan partisipasi dalam masyarakat. Keputusan yang menetapkan standar dari pengelolaan satuan Pendidikan dari Pemerintah tahun 2005 nomor 19 pasal 49 menetapkan bahwa pengelolaan satuan pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen khusus sekolah yang bercirikan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan tanggungjawab. Terkait dengan pelaksanaan penggunaan dana sekolah, Mulya & Rahayu (2021) melaporkan bahwa pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Dasar kota Surabaya mengacu kepada asas kecermatan, asas terperinci, asas keseluruhan, asas keterbukaan, asas periodik, dan asas pembebanan. Dan hasil penelitian mereka menunjukkan

bahwapengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Dasar kota Surabaya belum sepenuhnya memenuhi asas-asas tersebut. Banyak komponen yang mesti dipertimbangkan oleh pembuat anggaran dalam menghitung biaya pendidikan di sekolah. Komponen-komponen yang dimaksud adalah: 1. Peningkatan KBM 2. Peningkatan pembinaan kegiatan siswa 3. Pembinaan tenaga kependidikan 4. Rumah tangga sekolah 5. Pengadaan alat-alat belajar 6. Kesejahteraan 7. Pengadaan bahan pelajaran 8. Perawatan 9. Sarana kelas 10. Pengadaan alat-alat belajar 11. Sarana sekolah 12. Pembinaan tenaga kependidikan 13. Pembinaan siswa 14. Pengadaan bahan pelajaran 15. Pengelolaan sekolah, 16. Pemeliharaan dan penggantian sarana dan prasarana pendidikan 17. Biaya pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pelaporan. 18. Peningkatan mutu pada semua jenis dan jenjang pendidikan 19. Peningkatan kemampuan dalam menguasai iptek. Kemudian administrasi sekolah melibatkan guru dan komisi atau *stakeholders* sekolah dalam penyusunan RAPBS sebelum mengajukan kepada dinas pendidikan. Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan besarnya anggaran, yaitu biaya satuan dan besarnya kegiatan. Salah satu tujuan MBS adalah kepedulian Bersama terhadap pengambilan keputusan, pemberdayaan guru, pengelolaan sekolah, transformasi sekolah dan perencanaan perubahan. Oleh karena itu, sangat mungkin bahwa perencanaan keuangan sekolah yang mencakup semua aspek sekolah mendukung efektivitas pembiayaan sekolah yang baik dan juga dapat memperkuat kohesi dan rasa memiliki dengan memasukkan banyak aspek dalam pengambilan keputusan Pelaksanaan Sistem Laporan Sekolah

Semua yang berkaitan pada pengeluaran atau penerimaan anggaran yang mempengaruhi baik dari pemerintah atau non pemerintah selalu direkap secara rutin oleh bendahara dalam satu buku yang disebut Buku Kas Umum (BKU), beserta tanda bukti biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh SD Tarumajaya. Hal itu sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala sekolah sebagai berikut: “Bendahara kami selalu mencatat secara lengkap segala sesuatu yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran sekolah ini, lengkap pula dengan tanda bukti penerimaan dan pengeluarannya. Selanjutnya laporan berkalapun kami susun, yang meliputi laporan kegiatan secara lengkap dan rinci serta penggunaan sarana pelaporan kepada pihak yang berwenang”. Penggunaan atau konsumsi dana oleh SD Tarumajaya dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis pengeluaran antara lain: Pengeluaran untuk penyelenggaraan pengajaran, seperti penggandaan buku pelajaran peserta didik, perawatan sarana maupun prasarana sekolah, ketenteraman guru dan staf, administrasi, pengembangan teknis pengajaran, serta pengembangan ekstrakurikuler. Serta pendanaan yang diterima dari BOS digunakan serta dimanfaatkan untuk melengkapi kebutuhan sekolah. Pembiayaan tersebut dalam pemakaiannya juga dilaporkan dipapan pengumuman sekolah seluruh *stakeholder* sekolah dan masyarakat mengetahuinya. Sementara itu, dana lain yang dimiliki SD Tarumajaya, yaitu sumbangan sukarela wali murid, selalu dicatat dalam laporan rinci dan penggunaannya. Terkait mengenai laporan penggunaan dana sekolah, Rohiyatun (2018) menjelaskan bahwa di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rinjani menyampaikan laporan rutin berkala ke pihak Yayasan dan Dinas Pendidikan Kota Mataram. Perlu juga dicatat bahwa pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan dipantau. Untuk melihat serta melihat kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan peraturan yang ditetapkan dan serta prosedur yang berjalan, kesesuaian hasil yang diperoleh dengan peraturan dan perintah yang dikeluarkan, baik dibidang teknis administrasi maupun teknis operasional penggunaan fasilitas dan manusia, biaya, peralatan dan organisasi yang ada secara efektif dan efisien. Laporan keuangan yang dilakukan oleh kepala sekolah berangkat dari bagian keuangan sekolah, sebagaimana yang dikatakan oleh Muspawi (2018) bahwa kepala sekolah melakukan pendampingan atau supervisi kepada bagian keuangan, sehingga untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar untuk laporan keuangan sekolah. Kepala sekolah merupakan pihak yang sangat

bertanggungjawab dalam mengelola keuangan. Kepala sekolah harus mampu mengembangkan beberapa dimensi pembangunan administrasi. Terkait hal tersebut diperlukan analisis masalah dan lingkungan eksternal yang meliputi *strengths, weaknesses, opportunities and threats*. Secara umum, anggaran Pendidikan terdiri dari dua bagian yang saling berkaitan, yaitu anggaran pendapatan dan belanja. Anggaran pendapatan merupakan pendapatan yang diterima sekolah setiap tahunnya dari berbagai sumber yang telah ditentukan dan diterima secara rutin.

Akuntabilitas Sekolah SD Tarumajaya menunjukkan upaya untuk menjaga akuntabilitas sekolah. Hal ini dapat terlihat dari penuturan kepala sekolah pada hasil wawancara sebagai berikut: “Kami telah berupaya untuk menjaga akuntabilitas sekolah ini dalam hal pengelolaan dana pendidikan yang ada pada kami. Yang mana semua pengeluaran dan penerimaan dana di SD Tarumajaya dicatat dengan rapi, dalam penggunaan dan pengurusannya tetap dilakukan secara transparan tidak ada yang ditutupi, sehingga para *stakeholder* sekolah mengetahuinya, baik pada laporan keuangan yang berasal dari bantuan non pemerintah, sumbangan dari wali siswa atau pun seperti dana BOS”. Pengelolaan keuangan yang diterapkan di sekolah dapat dikatakan cukup baik, bersifat transparan dan bisa dilihat berbagai pihak. Dalam hal ini, laporan keuangan dipajang diruangan guru tepatnya pada bagian dinding sekolah dan dapat dilihat oleh siapa saja. Serta mengikut sertakan orangtua siswa dan masyarakat serta pengawas sekolah juga dilibatkan sehingga mereka juga dapat mengontrol penggunaan dana yang tersedia. Dalam membantu pengelolaan keuangan kearah yang lebih baik, kepala sekolah terlihat cukup memperhatikan peralatan pengelolaan keuangan, memiliki ruangan khusus yang dapat menyimpan peralatan pengelolaan, beliau memiliki buku-buku serta alat-alat yang diperlukan. Pelaksanaan anggaran juga dikendalikan oleh administrasi dan bendahara. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan dalam penggunaan dan penerapan anggaran sekolah. Karena berhubungan dengan uang atau masalah dana, maka bisa dikatakan sangat rawan terja dipenyelewengan, sehingga pihak sekolah sangat menjaga akuntabilitas sekolah harus bertanggungjawab untuk mencegah hal seperti itu terjadi. Akuntabilitas adalah tanggungjawab publik, yang berarti bahwa proses anggaran bertanggungjawab untuk mencapai tujuan. Akuntabilitas terbagi menjadi dua jenis, yaitu akuntabilitas vertical dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertical adalah pertanggungjawaban manajemen kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti penyelenggaraan negara, dan pertanggungjawaban negara kepada pemerintah. Akuntabilitas horizontal adalah akuntabilitas yang dibuat untuk individu dan institusi paralel. Tanggungjawab merupakan tugas untuk menugaskan atau menanggapi pihak yang memiliki informasi atau tanggungjawab, dan untuk menjelaskan kinerja dan kegiatan dari orang atau badan hukum atau kolektif kepemimpinan suatu organisasi. Oleh karena itu, sekolah berkewajiban untuk melaporkan segala tanggungjawabnya kepada pemerintah yang bertindak sebagai pemberi bantuan dalam hal ini, serta kepada orangtua ataupun masyarakat yang telah mempercayakan dan menepatkan anaknya dalam lembaga Pendidikan sekolah. Selain itu, transparansi dalam pemakaian biaya/dana juga diperlukan. Oleh sebab itu untuk meminimalisir serta menduga-duga penyelewengan dana. Sebaliknya, kerahasiaan penggunaan dana dan proses pelatihan menimbulkan ketidakpercayaan diantara mereka yang terlibat. Di lembaga pendidikan, transparansi berarti terbuka tentang sumber dan jumlah dana, detail penggunaan, dan pertanggungjawaban yang jelas. Penerapan transparansi dalam pengelolaan keuangan juga memiliki kelebihan yaitu melalui pertukaran informasi dapat tercipta rasa saling percaya secara efektif antara pengurus, masyarakat, wali murid dan siswa sekolah. Tujuan utama akuntabilitas kinerja sekolah adalah salah satu prasyarat terciptanya sekolah yang baik dan handal. Selain itu, tujuan akuntabilitas harus mengevaluasi keefektifan dan kepuasan public sekolah terhadap layanan Pendidikan yang diberikan oleh sekolah, melibatkan public dalam

inspeksi layanan pendidikan, dan bertanggungjawab atas keterlibatan publik dengan layanan pendidikan. Untuk mencapai tujuan akuntabilitas, sekolah kemudian harus berusaha untuk mengimplementasikannya. Masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan merasa puas dengan akuntabilitas pendidikan, karena pelaksanaan akuntabilitas Pendidikan sekolah telah membawa transparansi tentang apa yang dilakukan, apa yang telah dilakukan dan segala hal yang berkaitan dengan operasional dan keuangan sekolah. Hal ini tentunya juga menjadi tanggung jawab kepala sekolah sebagai pemimpin tertinggi di sekolah untuk menunjukkan kinerja yang baik, sebagaimana yang dikatakan Muspawi (2020) bahwa kepala sekolah merupakan pengendali untuk membawa sekolahnyamencapai target yang dituju. Di sisi lain, Sukur (2013) mengatakan bahwa ketika kepala sekolah bekerja dengan penuh tanggungjawab, sebagaimana yang terlaksana di MAN Negara Kabupaten Jembrana, maka berbagai pengelolaan termasuk pengelolaan keuangan sekolah berjalan dengan efektif.

Pemanfaatan keuangan sekolah bagi mutu proses pembelajaran di kelas. Pihak SD Tarumajaya telah berupaya memanfaatkan keuangan sekolah untuk menunjang mutu proses pembelajaran di kelas. Hal itu dapat diketahui dari hasil wawancara dengan kepala sekolah sebagai berikut: "Iya, kami berupaya untuk memanfaatkan keuangan sekolah ini dengan sebaik mungkin agar bisa menunjang mutu proses pembelajaran di kelas, yang mana kami berupaya untuk memenuhi beberapa unsur penting dalam proses belajar, seperti sarana dan prasarana yang dibutuhkan telah kami penuhi sedapat mungkin. Dan dengan terpenuhinya beberapa sarana dan prasarana penting seperti infocus, meja dan kursi belajar yang sesuai standar, suasana ruangan yang dipercantik dengan tujuan agar anak-anak lebih nyaman dalam proses belajar mengajar". Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Fatonah (2021) yang menginformasikan bahwa terdapat pengaruh pemanfaatan Dana Operasional Sekolah terhadap mutu proses pembelajaran di Sekolah. Begitu juga dengan hasil penelitian Kusumadewi (2015) yang melaporkan bahwa pembiayaan pendidikan ikut memberikan pengaruh terhadap kualitas pendidikan pada segala jenjangnya. Senada pula dengan yang disampaikan oleh Fauzi (2020) bahwa biaya pendidikan merupakan faktor yang penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, bahwa secara finansial Tarumajaya dapat dikatakan tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan dana pendidikan. Sehubungan dengan itu, SD Tarumajaya menerima sebagian pembiayaan dari SPP siswa/i yang setiap bulan dibayar oleh walimurid, dan bantuan operasional sekolah yang diberikan oleh pemerintah. Pembiayaan tersebut digunakan untuk keperluan sekolah atau proses pendidikan. Kedua, bendahara mencatat laporan penerimaan dan penyetoran dana, baik dana yang didapat dari pusat pendidikan (pemerintah) ataupun dana lainnya, secara teratur dan terperinci dalam buku pengelolaan keuangan umum. Kontribusi kepala sekolah maupun bendahara menunjukkan kerjasama yang sangat baik. Hal ini terlihat dari berbagai program-program di SD Tarumajaya dapat terlaksana sesuai dengan tujuan. Ketiga, sistem akuntabilitas yang diterapkan SD Tarumajaya menunjukkan tanggungjawab sekolah. Transparansi atau keterbukaan dilaksanakan, dibuktikan dengan penempatan laporan penggunaan dana dipapan pengumuman sehingga informasi dapat diakses oleh semua orang, serta melibatkan wali murid maupun masyarakat untuk mengecek laporan penyelenggaraan pendanaan agar dana yang diterima hanya digunakan untuk melaksanakan program sekolah. Keempat,

pemanfaatan keuangan sekolah dapat menunjang mutu proses pembelajaran di kelas. Hal ini terbukti dengan terpenuhinya beberapa sarana dan prasarana penting yang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, S. (2016). *Peran Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Karakter Bangsa*. Angewandte Chemie International, 7(1), 1–13.
- Budaya, B. (2017). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan pada Sekolah Dasar yang Efektif*. Likhitaprajna. Jurnal Ilmiah FKIP, 18(1), 42–59.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fadhli, M. (2017). *Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan*. Jurnal Studi Management Pendidikan, 1(02), 26–35.
- Fatonah, N. (2021). *Manfaat Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap Mutu Proses Pembelajaran*. Jurnal Pendidikan UNIGA, 15(2), 474.
- Fauzi, A. (2020). *Analisis Biaya Mutu dalam Meningkatkan Daya Saing Pendidikan*. Jumpa: Jurnal Manajemen Pendidikan, 1(1), 51–62.
- Ferdi, W. P. (2013). *Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 19(4), 565–578.
- Fitri, A. (2014). *Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi*. Jurnal Administrasi Pendidikan, 2(1), 33–831.
- Hafni, D. A., & Rahmawati, F. M. (2022). *Pengelolaan Keuangan Pendidikan pada Sekolah Dasar di Masa Pandemi Covid-19*. JAMP : Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan, 5(2), 93–104.
- Khuluqiah, K., Miranda, D. & Lukmanullhakim, L. (2022). *Pengelolaan Biaya Pendidikan di TK Al-Adaby Pontianak*. Khatulistiwa, 11(9), 2715–2723.
- Kusumadewi, R. F. (2015). *Pembiayaan Pendidikan di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 2(1), 43–64.
- Mulya, M. H. W., & Rahayu, T. (2021). *Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Surabaya*. Publika, 9(3), 181–194.
- Mulyasa, E. (2017). *Manajemen Berbasis Sekolah (16th ed.)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyono. (2019). *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta. Ar-Ruzz Media Grup.
- Muspawi, M. (2018). *Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Supervisi Keuangan*. Jurnal Sains Sosio Humaniora, 2(1), 15–24.
- Muspawi, M. (2020). *Strategi Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(2), 402–409.
- Rohiyatun, B. (2018). *Pengelolaan Biaya Pendidikan yang Efektif pada Pelaksanaan Program Kegiatan PAUD Rinjani sebagai Lembaga Trifungsi Pendidikan (TPA, KB dan TK)*. JIME, 4(1), 173–183.
- Sudarmono, S., Hasibuan, L., & Us, K. A. (2021). *Pembiayaan Pendidikan*. Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial, 2(1), 266–280.
- Sukur, L. D. (2013). *Studi Evaluatif tentang Pengelolaan Biaya Pendidikan pada Madrasah Aliyah Negeri Negara Kabupaten Jembrana*. E-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Administrasi Pendidikan, 4(1), 101–120.

- Usman, A. M. C. Z. H. N. (2016). *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Pada SMPNegeri 19 Percontohan Banda Aceh*. Jurnal Magister Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 4(2), 103–107.
- Yuliani, H. (2016). *Pembiayaan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Ngrojo Nanggulan Kulon Progo*. Jurnal Hanata Widya, 1(1), 54–68.
- Zein, M. (2016). *Strategi Pengelolaan Anggaran Biaya Pendidikan Berbasis Kinerja di Sekolah Menengah Atas Negeri Kabupaten Tanah Laut*. Jurnal Humaniora Teknologi, 1(1), 62–76.